

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian *Pre-Test*

INSTRUMEN PENELITIAN *PRE-TEST*

No.	Indikator	Sub Indikator	Instrumen Penelitian
1.	<i>Interpretation</i>	Mengkategorikan	<p>Perhatikan pernyataan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan seragam sekolah sesuai aturan 2. Mendapatkan pembelajaran yang berkualitas 3. Mematuhi tata tertib sekolah 4. Menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak 5. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan <p>Manakah dari pernyataan di atas yang termasuk dalam hak sebagai warga sekolah?</p> <ol style="list-style-type: none"> A. 1 dan 3 B. 2 dan 5 C. 2 dan 4 D. 3 dan 4 E. 1 dan 5 <p>Jawaban: B</p>
2.			<p>Di bawah ini adalah beberapa pernyataan tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara. 3. Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 4. Menjaga perdamaian dan keamanan di lingkungan sekitar adalah kewajiban warga negara. 5. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. <p>Berdasarkan kategori hak dan kewajiban, pernyataan yang termasuk dalam kelompok kewajiban adalah...</p>

			<p>A. 1 dan 3 B. 2 dan 4 C. 3 dan 5 D. 1, 2, dan 5 E. 2, 3, dan 4</p> <p>Jawaban: B</p>
3.		Menguraikan makna	<p>Dalam suatu diskusi kelas, Dika berpendapat bahwa ia tidak perlu melakukan piket kelas karena merasa bahwa membersihkan kelas adalah tugas petugas kebersihan sekolah. Dalam hal ini, bagaimana cara menguraikan makna dari sikap Dika dalam konteks hak dan kewajiban?</p> <p>A. Dika berhak menolak tugas piket karena ia tidak menerima gaji seperti petugas kebersihan. B. Sikap Dika menunjukkan bahwa Dika memahami haknya tetapi mengabaikan kewajibannya sebagai warga sekolah. C. Batasan tugas piket hanya berlaku bagi siswa yang mendapatkan hukuman dari guru. D. Sikap Dika menunjukkan bahwa kewajiban di sekolah hanya berlaku bagi mereka yang ingin melakukannya. E. Hak untuk tidak melakukan piket lebih penting daripada menjaga kebersihan sekolah.</p> <p>Jawaban: B</p>
4.			<p>Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Namun, sering kali dalam praktiknya, hak lebih dituntut daripada kewajiban yang harus dipenuhi. Fenomena ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menguraikan makna keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat?</p> <p>A. Keseimbangan antara hak dan kewajiban terjadi ketika setiap individu</p>

			<p>mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat.</p> <p>B. Hak seseorang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mereka diwajibkan untuk menjalankan kewajiban kepada masyarakat.</p> <p>C. Setiap individu berhak menuntut haknya, tetapi tidak wajib menjalankan kewajibannya jika merasa haknya tidak terpenuhi.</p> <p>D. Hak yang diperoleh masyarakat lebih diutamakan daripada kewajiban yang harus dilakukan, karena hak adalah sesuatu yang melekat pada individu sejak lahir.</p> <p>E. Keseimbangan terjadi jika setiap individu memahami bahwa hak yang mereka miliki tidak boleh melanggar hak orang lain serta kewajiban harus dijalankan tanpa menunggu orang lain melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu.</p> <p>Jawaban: E</p>
5.		Mengklarifikasi makna	<p>Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat anggapan bahwa hak lebih penting daripada kewajiban. Sebagai seorang siswa yang memahami prinsip kehidupan bernegara, bagaimana Anda menilai pernyataan tersebut?</p> <p>A. Benar, karena hak adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap warga negara tanpa kecuali.</p> <p>B. Salah, karena kewajiban lebih utama dibandingkan hak agar masyarakat tetap tertib.</p> <p>C. Tidak sepenuhnya benar, karena hak dan kewajiban harus berjalan seimbang.</p> <p>D. Benar, karena hak berkenaan dengan</p>

			<p>kebebasan individu dalam bermasyarakat.</p> <p>E. Salah, karena tanpa adanya hak, kewajiban tidak akan pernah terpenuhi</p> <p>Jawaban: C</p>
6.			<p>Seorang warga negara menolak ikut pemilu dengan alasan bahwa hak memilih adalah hak, bukan kewajiban. Namun banyak pihak yang beranggapan bahwa partisipasi dalam pemilu adalah bentuk tanggung jawab warga negara dalam demokrasi. Dari perspektif konstitusi, argumen yang paling tepat untuk menanggapi pernyataan tersebut?</p> <p>A. Tidak memilih dalam pemilu berarti warga negara telah melanggar hukum yang berlaku.</p> <p>B. Pemilu sebaiknya dihapuskan jika tidak semua warga negara mau berpartisipasi.</p> <p>C. Setiap warga negara harus dipaksa untuk memilih agar demokrasi berjalan dengan baik.</p> <p>D. Hak memilih memang tidak diwajibkan, namun berkontribusi dalam pemilu adalah bentuk kepedulian terhadap negara.</p> <p>E. Hak memilih dan hak untuk tidak memilih sama-sama harus dijamin sepenuhnya tanpa konsekuensi apa pun.</p> <p>Jawaban: D</p>
7.	Analysis	Memeriksa gagasan	<p>Andi merasa bahwa ia berhak mendapatkan nilai tinggi karena selalu hadir di kelas, meskipun ia jarang mengerjakan tugas dan tidak aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan sudut pandang konsep hak dan kewajiban, kesalahan pemahaman Andi adalah...</p> <p>A. Menganggap hak sebagai sesuatu yang dapat diperoleh tanpa menjalankan kewajiban.</p> <p>B. Menilai bahwa kehadiran di kelas lebih penting daripada pemahaman materi.</p>

			<p>C. Memiliki kepercayaan bahwa guru wajib memberikan nilai tinggi kepada semua siswa.</p> <p>D. Mengabaikan bahwa tugas dan keaktifan bukan bagian dari sistem penilaian.</p> <p>E. Berpikir bahwa hak untuk mendapatkan nilai tinggi bersifat mutlak dan tidak dapat dipertanyakan.</p> <p>Jawaban: A</p>
8.			<p>Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Jika seorang siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah berdasarkan konstitusi?</p> <p>A. Memberikan subsidi pendidikan hanya kepada sekolah-sekolah swasta.</p> <p>B. Membiarkan pihak sekolah menentukan kebijakan bantuan bagi siswa yang kurang mampu.</p> <p>C. Menghapus kewajiban pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.</p> <p>D. Mewajibkan sekitar masyarakat untuk membiayai pendidikan siswa tersebut.</p> <p>E. Memberikan program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa yang membutuhkan.</p> <p>Jawaban: E</p>
9.		Mengidentifikasi argumen	<p>Seorang siswa berpendapat bahwa aturan berpakaian di sekolah seharusnya dihapuskan karena membatasi hak kebebasan individu. Namun, guru berpendapat bahwa aturan tersebut dibuat untuk menciptakan disiplin dan kesetaraan di sekolah. Bagaimana cara terbaik untuk menanggapi argumen dari siswa tersebut?</p> <p>A. Menghapus aturan pakaian agar siswa dapat bebas mengekspresikan dirinya.</p>

			<p>B. Mempertahankan aturan berpakaian tanpa mempertimbangkan pendapat siswa.</p> <p>C. Mengizinkan siswa memilih pakaiannya sendiri tanpa batasan.</p> <p>D. Menyatakan bahwa hak kebebasan berpakaian lebih penting daripada aturan sekolah.</p> <p>E. Meninjau kembali aturan berpakaian dan berdiskusi dengan seluruh warga sekolah.</p> <p>Jawaban: E</p>
10.			<p>Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun, ada anggapan bahwa pemerintah wajib menyediakan pekerjaan bagi setiap individu. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan yang paling tepat untuk menanggapi argumen tersebut adalah...</p> <p>A. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan keterampilan agar bisa mendapatkan pekerjaan.</p> <p>B. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas tersedianya pekerjaan bagi semua warga negara.</p> <p>C. Hak atas pekerjaan berarti setiap warga negara berhak menuntut pekerjaan tanpa usaha pribadi.</p> <p>D. Jika pemerintah tidak menyediakan lapangan kerja, berarti hak konstitusional warga negara telah dilanggar.</p> <p>E. Hak atas pekerjaan tidak relevan dalam sistem ekonomi yang berbasis pasar bebas</p> <p>Jawaban: A</p>
11.		Mengidentifikasi alasan dan klaim	<p>Salah satu hak warga masyarakat adalah mendapatkan layanan kesehatan yang layak dari pemerintah. Namun pada kenyataannya, masih banyak</p>

			<p>masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Berikut ini yang merupakan alasan paling tepat dari analisis penyebab utama permasalahan tersebut adalah...</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan kesehatan. B. Pemerintah kurang memiliki anggaran untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. C. Tidak semua masyarakat memahami prosedur untuk mendapatkan layanan kesehatan. D. Distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang belum merata. E. Warga terlalu bergantung pada pengobatan tradisional dibandingkan medis. <p>Jawaban: D</p>
12.			<p>Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah membatasi kebebasan dengan alasan menjaga stabilitas nasional. Berdasarkan hal tersebut, yang merupakan argumen paling logis terhadap kebijakan tersebut adalah...</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pemerintah mempunyai hak mutlak untuk membatasi pengertian kebebasan demi kepentingan negara. B. Tidak ada kondisi apa pun yang membenarkan kebebasan berpendapat karena hak tersebut bersifat absolut. C. Pembatasan kebebasan berpendapat harus disertai alasan yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. D. Kebebasan diartikan hanya boleh diberikan kepada warga negara yang mendukung kebijakan pemerintah.

			<p>E. Pemerintah harus melarang segala bentuk kritik karena dapat mengganggu perdamaian sosial.</p> <p>Jawaban: C</p>
13.	<i>Evaluation</i>	Menilai kredibilitas klaim	<p>Sekolah Nusa Bangsa menyatakan bahwa setiap siswa memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mendapatkan fasilitas belajar yang memadai. Namun pada kenyataannya, masih banyak siswa yang tidak disiplin, sering terlambat, dan tidak mengerjakan tugas sekolah.</p> <p>Berdasarkan kasus tersebut, bagaimana evaluasi yang paling tepat terhadap keseimbangan hak dan kewajiban siswa?</p> <p>A. Hak siswa tetap harus diberikan tanpa mempertimbangkan kewajiban mereka.</p> <p>B. Siswa yang tidak menjalankan kewajibannya harus dicabut hak pendidikannya.</p> <p>C. Hak pendidikan harus tetap diberikan, tetapi siswa perlu diberi konsekuensi atas kejahatan mereka.</p> <p>D. Sekolah perlu menghapus aturan tentang kewajiban agar siswa lebih nyaman dalam belajar.</p> <p>E. Siswa yang tidak menjalankan kewajiban tidak berhak mendapatkan fasilitas pendidikan.</p> <p>Jawaban: C</p>
14.			<p>Konstitusi menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Namun, dalam realitas sosial, masih terdapat kasus-kasus diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Apa tindakan yang paling sesuai dengan nilai konstitusional untuk mengatasi masalah ini?</p> <p>A. Mengeluarkan peraturan yang mengatur satu agama sebagai agama utama negara.</p> <p>B. Menghapus hak kebebasan beragama demi menjaga umum.</p>

			<p>C. Membatasi jumlah penganut agama tertentu agar tidak menimbulkan konflik.</p> <p>D. Memberikan sanksi hukum kepada pihak yang melakukan diskriminasi.</p> <p>E. Hanya mengizinkan agama-agama tertentu yang boleh menggunakan ruang publik.</p> <p>Jawaban: D</p>
15.		Menilai kualitas argumen yang dibuat menggunakan penalaran induktif dan deduktif	<p>Di beberapa daerah, warga yang aktif membayar pajak mendapatkan layanan publik yang lebih baik dibandingkan warga yang tidak membayar pajak. Oleh karena itu, semua warga yang tidak membayar pajak pasti akan mendapatkan layanan publik yang buruk. Apa yang dapat diperoleh dari pernyataan tersebut?</p> <p>A. Argumen kuat karena didukung oleh fakta yang terjadi di beberapa daerah.</p> <p>B. Argumen lemah karena generalisasi dari beberapa daerah tidak selalu berlaku untuk semua warga.</p> <p>C. Argumen benar karena hubungan antara pajak dan layanan publik sudah terbukti.</p> <p>D. Argumen tidak valid karena pajak bukan satu-satunya sumber pendanaan layanan publik.</p> <p>E. Argumen dapat diterima karena ada pola umum antara pajak dan kualitas layanan.</p> <p>Jawaban: B</p>
16.			<p>Dalam diskusi publik, seorang ekonom menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak mengatur upah minimum karena pasar bebas akan menyesuaikan upah sesuai dengan mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan yang sesuai adalah...</p> <p>A. Argumen ini valid karena negara tidak boleh ikut campur dalam hubungan</p>

			<p>antara pekerja dan pemberi kerja.</p> <p>B. Argumen ini tidak logis karena tidak semua negara menerapkan sistem ekonomi pasar bebas.</p> <p>C. Argumen ini kuat karena mekanisme pasar bebas dapat menciptakan keseimbangan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah.</p> <p>D. Argumen ini lemah karena tanpa regulasi pemerintah, pekerja berisiko menerima upah yang tidak layak.</p> <p>E. Argumen ini dapat diterima karena kebijakan upah minimum sering kali menghambat pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Jawaban: D</p>
17.	<i>Inference</i>	Mempertanyakan bukti	<p>Sebagian besar warga di desa satu rasa mengeluhkan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun, data dari pemerintah menunjukkan bahwa sebagian besar warga di daerah tersebut tidak membayar pajak secara penuh. Berdasarkan informasi ini, pertanyaan yang paling relevan untuk meninjau bukti sebelum menyimpulkan bahwa pemerintah gagal memenuhi hak masyarakat adalah...</p> <p>A. Apakah ada faktor lain selain pajak yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di daerah tersebut?</p> <p>B. Apakah semua warga yang mengeluhkan pelayanan publik ternyata tidak membayar pajak?</p> <p>C. Bagaimana transparansi alokasi dana pajak yang diterima pemerintah untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan?</p> <p>D. Apakah pemerintah memiliki bukti kuat bahwa rendahnya pembayaran pajak benar-benar menjadi</p>

			<p>penyebab buruknya pelayanan publik?</p> <p>E. Semua jawaban di atas benar, karena tanpa ulasan bukti yang bersumber dari berbagai pertanyaan, kesimpulan tentang berhasil atau gagalnya pemerintah tidak dapat sembarang ditentukan.</p>
18.	Dugaan alternatif		<p>Jawaban: E</p> <p>Sebagian siswa dari sekolah tunas muda menuntut hak mereka untuk mendapatkan fasilitas laboratorium yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, pada saat yang sama, banyak siswa yang tidak merawat fasilitas yang sudah ada, seperti memecahkan erlenmeyer, merusak mikroskop, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang konsep hak dan kewajiban, dampak paling mungkin yang akan terjadi akibat kesinambungan ini adalah...</p> <p>A. Sekolah akan segera menyediakan fasilitas baru meskipun siswa tidak merawat yang lama.</p> <p>B. Guru kimia akan mengurangi jam pelajaran kimia karena fasilitas tidak digunakan dengan baik.</p> <p>C. Pihak sekolah akan tetap memperbaiki fasilitas tanpa mempertimbangkan perilaku siswa.</p> <p>D. Siswa akan kehilangan hak mereka untuk menggunakan fasilitas laboratorium jika mereka tidak menjalankan kewajiban untuk menjaga laboratorium</p> <p>E. Semua siswa akan mulai sadar akan pentingnya menjaga fasilitas secara mandiri tanpa perlu aturan sekolah.</p> <p>Jawaban: D</p>
19.			<p>Kebebasan diartikan sebagai hak konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. Namun, di era digital, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks semakin meningkat. Solusi alternatif yang</p>

			<p>dapat dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan hak kebebasan dengan upaya memberantas hoaks adalah...</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Mendorong literasi digital dan membentuk mekanisme klarifikasi informasi tanpa membatasi hak berbicara. B. Menutup akses internet bagi individu yang dianggap menyebarkan berita palsu. C. Melarang semua bentuk kritik terhadap pemerintah agar tidak terjadi penyebaran informasi yang salah. D. Menjadikan pemerintah sebagai satu-satunya sumber informasi resmi yang boleh menyebarkan. E. Menghapus hak kebebasan berpendapat untuk menghindari risiko menyebarkan informasi. <p>Jawaban: A</p>
20.		<p>Menarik kesimpulan menggunakan penalaran induktif dan deduktif</p>	<p>Pada proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila, seorang guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya dalam diskusi kelas. Namun, sebagian siswa justru menggunakan kesempatan ini untuk berbicara tanpa aturan, menyampaikan pendapat secara arogan mengganggu berlangsungnya pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, apa hasil yang paling mungkin dari kondisi tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Suasana kelas lebih menjadi demokratis dan siswa merasa lebih bebas dalam belajar. B. Diskusi menjadi tidak terarah sehingga tujuan pembelajaran sulit tercapai. C. Semua siswa akhirnya menyadari pentingnya menyampaikan pendapat dengan baik.

			<p>D. Hak berbicara siswa lainnya tetap terjaga meskipun ada gangguan dalam diskusi.</p> <p>E. Guru harus menghilangkan hak berbicara siswa agar pembelajaran lebih kondusif.</p>
21.			<p>Jawaban: B</p> <p>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sementara itu, dalam Pasal 28D Ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”</p> <p>Berdasarkan prinsip konstitusional tersebut, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kasus diskriminasi dalam pemberian layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, terhadap kelompok masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan?</p> <p>A. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan mengenai layanan publik agar semua warga negara termasuk mereka yang belum memiliki dokumen kependudukan, tetap dapat mengakses hak-haknya.</p> <p>B. Pemerintah sebaiknya tetap berpegang teguh pada aturan administrasi, karena konstitusi juga mengatur kewajiban warga negara untuk menaati hukum yang berlaku.</p> <p>C. Pemerintah hanya perlu memberikan solusi khusus bagi kelompok tertentu, seperti masyarakat adat, tanpa mengubah aturan yang berlaku bagi warga negara secara umum.</p>

			<p>D. Pemerintah harus menyerahkan tanggung jawab ini kepada lembaga swasta dan organisasi non-pemerintah agar mereka dapat membantu warga yang terdampak.</p> <p>E. Pemerintah tidak perlu mengubah kebijakan karena sudah ada jalur legal yang bisa digunakan warga untuk mengurus dokumen kependudukan mereka.</p> <p>Jawaban: A</p>
22.	<i>Explanation</i>	Menyatakan hasil	<p>Pada dasarnya, masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Berdasarkan penelitian tersebut, bagaimana cara terbaik untuk menjelaskan keterkaitan antara pemahaman hak dan kewajiban dengan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat?</p> <p>A. Kegiatan sosial dan politik hanya dilakukan oleh mereka yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi, bukan karena terhadap pemahaman hak dan kewajiban.</p> <p>B. Partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik tidak berhubungan dengan pemahaman hak dan kewajiban, karena banyak orang ikut serta tanpa memahami konsep tersebut.</p> <p>C. Hak dan kewajiban hanya berpengaruh pada individu, bukan pada tingkat partisipasi masyarakat secara umum.</p> <p>D. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya merasa bertanggung jawab terhadap lingkungannya dan lebih cenderung terlibat dalam aktivitas sosial dan politik.</p> <p>E. Pemerintah harus melibatkan semua warga untuk berpartisipasi dalam</p>

			<p>kegiatan sosial dan politik agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya.</p> <p>Jawaban: D</p>
23.		Justifikasi	<p>Di desa Sumber Makmur, pemerintah berencana untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai hak dan kewajibannya agar tercipta masyarakat yang lebih harmonis. Berdasarkan pemahaman Anda, strategi mana yang paling efektif untuk menjelaskan kepada masyarakat pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban?</p> <p>A. Mengadakan program edukasi di sekolah dan komunitas desa tentang hubungan antara hak dan kewajiban.</p> <p>B. Memberikan insentif bagi warga yang menjalankan kewajibannya dengan baik.</p> <p>C. Menyediakan layanan publik hanya bagi warga yang telah memenuhi kewajibannya.</p> <p>D. Menghukum warga yang tidak menjalankan kewajibannya agar mereka sadar akan hak mereka.</p> <p>E. Membuat peraturan yang lebih ketat agar hak warga dapat terjamin sepenuhnya.</p> <p>Jawaban: A</p>
24.			<p>Di desa Mulia, pemerintah daerah menerapkan kebijakan bahwa setiap warga wajib mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan minimal satu kali dalam sebulan. Sebagian warga mendukung kebijakan ini dengan alasan bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama, sementara sebagian lainnya menolak dengan alasan bahwa kebersihan seharusnya menjadi tugas dari petugas kebersihan yang sudah digaji oleh pemerintah. Dari perspektif hak dan kewajiban sebagai masyarakat, bagaimana justifikasi yang paling tepat untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut?</p>

			<p>A. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, sehingga warga tidak memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam kerja bakti.</p> <p>B. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih apakah ingin berpartisipasi dalam kerja bakti atau tidak, tanpa ada kewajiban yang mengikat.</p> <p>C. Kebijakan ini membatasi kebebasan warga negara karena tidak semua orang memiliki waktu luang untuk berpartisipasi dalam kerja bakti.</p> <p>D. Menjaga kebersihan lingkungan adalah hak sekaligus kewajiban bersama, sehingga kerja bakti menjadi wujud kontribusi warga terhadap lingkungan mereka sendiri.</p> <p>E. Petugas kebersihan sudah dibayar untuk membersihkan lingkungan, sehingga warga tidak perlu terlibat dalam kerja bakti yang bersifat kolektif.</p> <p>Jawaban: D</p>
25.		Memberikan argumen	<p>Di sebuah sekolah, banyak siswa yang mengeluh bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan belajar dengan nyaman karena beberapa siswa lain sering mengganggu kegiatan pembelajaran. Jika Anda menjadi ketua kelas, solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini?</p> <p>A. Mengajukan peraturan baru agar siswa yang mengganggu langsung dikeluarkan dari kelas.</p> <p>B. Melaporkan masalah ini ke guru dan berdiskusi untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.</p> <p>C. Mengabaikan keluhan siswa lain karena setiap siswa mempunyai cara belajar yang berbeda.</p>

			<p>D. Meminta guru untuk memberikan hukuman berat kepada siswa yang sering mengganggu.</p> <p>E. Memerintah siswa yang merasa terganggu untuk mencari kelas lain yang lebih kondusif.</p> <p>Jawaban: B</p>
26.			<p>Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus kebencian dan penyebaran hoaks di media sosial yang dilakukan oleh para pengguna media sosial. Di satu sisi, kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, tetapi di sisi lain, kebencian dapat merusak persatuan bangsa dan menimbulkan konflik sosial. Sebagai warga negara yang peduli terhadap kondisi ini, strategi paling tepat untuk menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dengan kewajiban menjaga perdamaian dan persatuan adalah...</p> <p>A. Mengusulkan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan media sosial, termasuk penghapusan akun yang terlibat dalam penyebaran hoaks dan kebencian.</p> <p>B. Menggalang aksi sosial dengan melakukan kampanye berani untuk memboikot akun-akun yang menyebarkan kebencian dan hoaks.</p> <p>C. Membangun platform edukasi digital yang memberikan literasi media dan pelatihan berpikir kritis kepada masyarakat dalam menanggapi informasi di media sosial.</p> <p>D. Mendorong pemerintah untuk menyatukan dan menyensor seluruh konten di media sosial agar informasi yang beredar tetap sesuai dengan kepentingan nasional.</p> <p>E. Mengajukan petisi kepada perusahaan media sosial agar membatasi kebebasan berekspresi yang</p>

			berpotensi menimbulkan konflik sosial.
			Jawaban: C
27.	<i>Self Regulation</i>	Memeriksa diri sendiri	<p>Sari dan teman-teman yang lain merasa aneh melihat baju Tina yang terlihat lusuh sehingga menganggap Tina sebagai orang miskin dan secara tidak sadar mengejeknya. Awalnya, Sari menganggap hal tersebut hanya sebagai sebuah lelucon. Namun, kemudian Sari menyadari bahwa Tina mulai tampak murung dan menghindari interaksi sosial Berdasarkan hal ini, apa langkah terbaik yang harus Sari lakukan setelah menyadari dampak dari tindakannya tersebut?</p> <p>A. Mengajak teman lain untuk melanjutkan candaan agar situasi tetap menyenangkan.</p> <p>B. Tetap diam dan tidak terlibat lebih jauh agar tidak ikut terkena masalah.</p> <p>C. Berpura-pura tidak mengetahui apa pun agar tidak mendapat perhatian negatif.</p> <p>D. Meminta maaf kepada Tina dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.</p> <p>E. Menyarankan kepada teman yang diejek agar lebih kuat dan tidak mudah direndahkan.</p> <p>Jawaban: D</p>
28.			<p>Salah satu kewajiban warga negara yang diatur dalam konstitusi adalah serta ikut serta dalam upaya perlindungan negara. Dalam kondisi negara sedang mengalami ancaman keamanan, tindakan warga negara yang paling sesuai dengan prinsip konstitusional adalah...</p> <p>A. Turut serta dalam bela negara sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.</p> <p>B. Meninggalkan negara untuk mencari perlindungan di luar negeri.</p>

			<p>C. Menyerahkan seluruh tanggung jawab pertahanan kepada aparat militer.</p> <p>D. Menghindari segala bentuk keterlibatan dalam masalah perlindungan.</p> <p>E. Menggunakan media sosial untuk mengujarkan kebencian kepada pihak yang berlawanan.</p> <p>Jawaban: A</p>
29.		<p>Mengoreksi diri sendiri</p>	<p>Saat jam istirahat, Riko menyaksikan Aldo yang sedang mengalami perundungan secara verbal di kantin sekolah. Pada saat kejadian, Riko tidak ikut serta melakukan perundungan, tidak juga melakukan suatu tindakan yang dapat menghentikan perundungan yang dialami oleh Aldo. Berdasarkan hal ini, jika Riko merefleksikan kembali tindakan tersebut, apa evaluasi terbaik terhadap peran Riko dalam situasi ini?</p> <p>A. Riko harus mampu bertindak tegas, karena diam saja berarti membiarkan perundungan terjadi.</p> <p>B. Riko tidak bersalah karena bukan Riko yang melakukan perundungan.</p> <p>C. Tindakan Riko sudah baik karena sebaiknya tidak ikut campur karena itu bukan urusan Riko.</p> <p>D. Riko hanya menjadi penonton, jadi tidak ada yang perlu dievaluasi dari tindakan Riko.</p> <p>E. Riko melakukan hal yang benar dengan tetap diam agar tidak ikut terkena masalah.</p> <p>Jawaban: A</p>
30.			<p>Budi merupakan masyarakat yang aktif dalam menggunakan media sosial. Budi seringkali membagikan informasi tentang kebijakan pemerintah tanpa memeriksa kebenarannya. Ia merasa bahwa sebagai warga negara, ia berhak menyampaikan pendapatnya secara</p>

			<p>bebas. Namun, suatu ketika ia menyebarkan berita hoaks yang ternyata memicu keresahan di masyarakat. Bagaimana cara terbaik bagi Budi dalam mengevaluasi dirinya sendiri?</p> <ul style="list-style-type: none">A. Menghapus unggahan berita hoaks dan mulai memverifikasi kebenarannya sebelum membagikan sebuah informasi.B. Tetap membagikan berita tanpa verifikasi karena merasa itu adalah haknya untuk berbicara bebas.C. Menyalahkan orang lain yang percaya pada berita hoaks tersebut dan menganggap itu bukan tanggung jawabnya.D. Menghindari diskusi tentang politik dan berita agar tidak perlu bertanggung jawab atas informasi yang ia sebar.E. Bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang telah dilakukannya. <p>Jawaban: A</p>
--	--	--	--

Intelligentia - Dignitas

Lampiran 2. Instrumen Penelitian *Post-Test*INSTRUMEN PENELITIAN *POST-TEST*

No.	Indikator	Sub Indikator	Instrumen Penelitian
1.	<i>Interpretation</i>	Mengkategorikan	<p>Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan antara hak dan kewajiban?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Hak dan kewajiban tidak saling berkaitan B. Kewajiban bisa ditunda, tapi hak harus segera dipenuhi C. Hak lebih penting karena menyangkut martabat manusia D. Kewajiban hanya berlaku bagi aparatur negara E. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang <p>Jawaban: E</p>
2.			<p>Mengapa penting bagi setiap warga negara untuk menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Karena kewajiban itu mutlak, sedangkan hak bisa ditunda B. Karena negara hanya melayani warga yang patuh C. Karena hak tidak dapat diperoleh tanpa menjalankan kewajiban D. Karena hak dan kewajiban selalu bergantian waktunya E. Karena kewajiban adalah bentuk ketidakseimbangan atas hak <p>Jawaban: C</p>
3.		Menguraikan makna	<p>Apa akibat jika masyarakat hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Negara akan tetap bertanggung jawab penuh B. Keseimbangan kehidupan sosial akan tetap stabil

			<p>C. Tidak ada pengaruh karena hak bersifat pribadi</p> <p>D. Terjadi ketimpangan dan rusaknya tatanan sosial</p> <p>E. Hak akan dipenuhi secara otomatis oleh sistem hukum</p> <p>Jawaban: D</p>
4.			<p>Di sekolah, Dika selalu aktif mengikuti kegiatan piket kelas dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ia juga sering mengingatkan teman-temannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Sikap Dika menunjukkan bahwa ia telah menjalankan...</p> <p>A. Hak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang bersih</p> <p>B. Kewajiban untuk menjaga nama baik sekolah</p> <p>C. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil</p> <p>D. Hak untuk menyampaikan pendapat</p> <p>E. Kewajiban menjaga kebersihan dan menjaga sekolah</p> <p>Jawaban: E</p>
5.		Mengklarifikasi makna	<p>Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memainkan berbagai peran yang berkaitan dengan identitas sosial dan hukum yang melekat padanya, termasuk sebagai siswa di sekolah, anggota masyarakat, dan warga negara. Masing-masing peran tersebut membawa hak dan kewajiban yang tidak selalu sama, namun saling terkait. Misalnya, seorang siswa memiliki kewajiban menaati tata tertib sekolah, seorang anggota masyarakat berkewajiban menjaga ketertiban lingkungan, sedangkan sebagai warga negara, seseorang wajib</p>

		<p>membayar pajak dan taat pada hukum nasional.</p> <p>Dari ilustrasi tersebut, jika seorang siswa berusia 16 tahun mengikuti aksi demonstrasi menuntut kebijakan pendidikan yang adil sambil membolos sekolah dan tidak mengikuti ujian tengah semester, maka dalam konteks hak dan kewajiban dari berbagai peran yang dimilikinya, tindakan tersebut paling tepat dikategorikan sebagai...</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pemenuhan hak sebagai warga negara sekaligus pelanggaran kewajiban sebagai warga sekolah B. Pelanggaran terhadap seluruh kewajiban yang melekat pada semua peran sosialnya C. Pemenuhan hak sebagai warga sekolah yang berpendapat, meski melanggar aturan masyarakat D. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat, namun abai terhadap hak sebagai pelajar E. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kebebasan berpendapat secara umum <p>Jawaban: A</p>
<p>6.</p>		<p>Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat memiliki peran yang berbeda-beda secara bersamaan, misalnya sebagai siswa di sekolah, anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, dan warga negara dalam konteks kenegaraan. Setiap peran membawa hak dan kewajiban yang tidak selalu sama, meskipun mungkin terlihat serupa. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pendapat melalui forum OSIS mengenai kegiatan sekolah yang dianggap kurang bermanfaat 2. Mentaati aturan lalu lintas saat mengendarai kendaraan di jalan raya 3. Memberikan suara dalam pemilu sebagai bentuk partisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara 4. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan RT setiap akhir pekan 5. Mendapatkan perlakuan adil dari guru tanpa diskriminasi terhadap latar belakang ekonomi keluarga <p>Dari kelima pernyataan tersebut, maka yang secara tepat dapat dikategorikan sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, dan bukan sebagai warga masyarakat atau warga negara?</p> <ol style="list-style-type: none"> A. 1 dan 5 B. 2 dan 3 C. 1, 3, dan 5 D. 1, 4, dan 5 E. 2, 4, dan 5 <p>Jawaban: A</p>
7.	<i>Analysis</i>	Memeriksa gagasan	<p>Dalam konteks masyarakat demokratis, setiap individu memiliki hak untuk berpendapat. Namun, di sebuah komunitas sekolah digital, seorang siswa menyampaikan kritik terhadap program kegiatan sekolah dengan bahasa yang keras dan menyinggung beberapa guru. Hal ini menimbulkan kejadian yang tajam dan membuat sebagian guru serta siswa merasa tidak nyaman.</p>

		<p>Bagaimana seharusnya hak-hak tersebut di atas dilaksanakan agar tidak bertentangan dengan kewajiban menjaga keselarasan dan etika di lingkungan sekolah?</p> <p>A. Dengan mengutarakan pendapat secara bebas dan keras karena setiap warga sekolah dijamin kebebasan berekspresi.</p> <p>B. Dengan menggunakan bahasa yang sopan dan argumentatif serta memilih media dan waktu yang tepat untuk menyampaikan kritik.</p> <p>C. Dengan menyampaikan kritik secara pribadi kepada guru yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kegaduhan.</p> <p>D. Dengan menarik kembali kritik yang telah disampaikan dan meminta maaf karena telah mengganggu kenyamanan orang lain.</p> <p>E. Dengan menyarankan agar sekolah membatasi kebebasan berpendapat di media digital untuk menjaga keharmonisan.</p>
8.		<p>Jawaban: B</p> <p>Dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi ketimpangan antara keduanya, seperti ketika seseorang menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, atau menjalankan kewajiban tetapi haknya diabaikan. Dalam</p>

			<p>konteks tersebut, bayangkan sebuah situasi di mana warga negara menuntut pelayanan kesehatan yang layak dari negara, namun sebagian besar masyarakat enggan membayar pajak yang merupakan sumber pembiayaan pelayanan publik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berikut pernyataan yang paling tepat dan menunjukkan pemahaman kritis mengenai hubungan antara hak dan kewajiban serta pentingnya keseimbangan keduanya dalam membangun kehidupan yang adil dan berkelanjutan?</p> <p>A. Warga negara berhak atas pelayanan kesehatan tanpa syarat, karena hak asasi manusia harus dijamin sepenuhnya oleh negara, terlepas dari apakah masyarakat menjalankan kewajibannya atau tidak.</p> <p>B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan agar terciptanya keadilan sosial. Oleh karena itu, warga negara harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu untuk dapat menuntut hak-haknya secara sah dan bermoral.</p> <p>C. Selama negara belum mampu memenuhi seluruh hak rakyatnya secara sempurna, maka rakyat tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan negara, termasuk dalam hal membayar pajak.</p> <p>D. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang berdiri sendiri; jika seseorang telah</p>
--	--	--	--

			<p>menjalankan kewajibannya, tidak ada jaminan bahwa haknya akan terpenuhi karena banyak faktor di luar kendali individu.</p> <p>E. Untuk menciptakan masyarakat yang ideal, negara sebaiknya fokus terlebih dahulu pada menyediakan hak-hak warga negara, baru kemudian menuntut kewajiban mereka agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.</p> <p>Jawaban: B</p>
<p>9.</p>		<p>Mengidentifikasi argumen</p>	<p>Dalam kehidupan sehari-hari, seorang siswa bernama Aditya aktif sebagai Ketua OSIS di sekolah, mengikuti kegiatan karang taruna di lingkungan tempat tinggalnya, dan juga dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sekitar sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan gotong royong. Di sisi lain, ia juga melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika melihat adanya praktik pungutan pembohong di pelayanan lingkungan masyarakat. Jika ditinjau dari peran Aditya dalam konteks hak dan kewajiban, maka tindakan-tindakannya mencerminkan adanya pengelompokan peran yang dapat dicincang ke dalam...</p> <p>A. Kewajiban sebagai siswa, karena seluruh aktivitasnya berada dalam lingkup sekolah dan pendidikan formal yang memuat norma tata tertib</p> <p>B. Hak sebagai warga negara, karena ia menggunakan hak berpendapat</p>

		<p>kebebasan dan berserikat dalam berbagai bentuk kegiatan</p> <p>C. Tanggung jawab moral sebagai individu yang peduli terhadap kebersihan dan keamanan lingkungan sosial tanpa keselamatannya pada hak atau kewajiban formal</p> <p>D. Kombinasi peran warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara yang menunjukkan keterpaduan antara hak dan kewajiban sesuai ruang lingkungannya masing-masing</p> <p>E. Hak individu dalam masyarakat demokratis, karena ia bebas memilih dan menentukan partisipasi tanpa harus dibebani oleh kewajiban</p> <p>Jawaban: D</p>
<p>10.</p>		<p>Rafi merupakan salah satu siswa yang selalu datang terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, dan sering mengganggu proses pembelajaran di kelas. Namun, ia sering kali memprotes guru dan pihak sekolah karena merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup, tidak pernah dipilih menjadi ketua kelas, serta merasa haknya sebagai peserta didik diabaikan. Ia menuntut agar hak-haknya diberikan kepada siswa sepenuhnya, termasuk hak untuk didengarkan, dihargai pendapatnya, dan diperlakukan secara adil. Berdasarkan kasus tersebut, bagaimana seharusnya kita menganalisis sikap Rafi dalam konteks hubungan antara hak</p>

			<p>dan kewajiban warga negara menurut nilai-nilai Pancasila?</p> <p>A. Rafi memiliki hak penuh sebagai warga sekolah sehingga kewajibannya tidak boleh menjadi penghalang dalam memperoleh hak tersebut, sesuai dengan prinsip keadilan sosial.</p> <p>B. Rafi telah mengabaikan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang seharusnya dijalankan secara bertanggung jawab demi terwujudnya kehidupan yang adil dan beradab.</p> <p>C. Tuntutan Rafi sah secara hukum karena setiap warga negara berhak mengekspresikan pendapat tanpa syarat, sesuai dengan nilai demokrasi.</p> <p>D. Rafi tidak sepenuhnya salah karena sistem pendidikan harus memberikan hak kepada siswa terlebih dahulu agar mereka termotivasi menjalankan kewajibannya.</p> <p>E. Tindakan Rafi mencerminkan semangat kritis dan aktif dalam memperjuangkan hak, sehingga patut dihargai meskipun ia belum menjalankan kewajibannya</p> <p>Jawaban: B</p>
11.		Mengidentifikasi alasan dan klaim	Di dalam suatu masyarakat yang majemuk, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk saling menghormati perbedaan. Namun, dalam

			<p>kenyataannya sering kali muncul konflik akibat ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban antar individu yang berbeda latar belakang. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini dan mencegah terjadinya perpecahan adalah...</p> <p>A. Mendorong semua orang untuk mengikuti pandangan mayoritas demi tercapainya kedamaian sosial.</p> <p>B. Menerima dan menghormati perbedaan pendapat dan kebiasaan orang lain, sambil mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya toleransi dan saling pengertian.</p> <p>C. Memaksakan satu pandangan atau cara hidup kepada orang lain yang dianggap lebih "benar" tanpa memperhatikan hak mereka untuk memilih.</p> <p>D. Menjauhkan diri dari perbedaan dan hanya bergaul dengan orang-orang yang sepaham dengan kita.</p> <p>E. Menanggapi perbedaan dengan mengkritik secara terbuka tanpa mencoba memahami alasan atau latar belakang orang lain.</p> <p>Jawaban: B</p>
12.			<p>Rani adalah seorang warga negara yang sering menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal, seperti fasilitas kesehatan gratis, pendidikan berkualitas, dan keamanan lingkungan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, Rani</p>

			<p>enggan membayar pajak, sering membuang sampah sembarangan, serta tidak pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungannya. Ia merasa bahwa membayar pajak adalah urusan orang kaya, menjaga lingkungan adalah tugas petugas kebersihan, dan keamanan lingkungan adalah tanggung jawab penuh aparat. Dari ilustrasi tersebut, tindakan Rani mencerminkan fenomena sosial yang banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pemahaman Anda, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan ketidaksesuaian antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban seperti yang dilakukan Rani?</p> <p>A. Tindakan Rani wajar karena setiap warga negara berhak menuntut haknya, tanpa harus mempertimbangkan apakah ia telah melaksanakan kewajibannya atau tidak, karena hak adalah prioritas utama.</p> <p>B. Rani merupakan warga negara yang kritis terhadap pemerintah, karena kritik seperti itu tidak memerlukan pelaksanaan kewajiban pribadi terlebih dahulu.</p> <p>C. Tindakan Rani mencerminkan sikap yang tidak konsisten sebagai warga negara, karena ia menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya yang dapat mencakup keberlangsungan</p>
--	--	--	---

			<p>kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>D. Tuntutan Rani terhadap pemerintah menunjukkan sikap demokratis, karena negara wajib memenuhi semua hak warga negara meskipun warga belum tentu menjalankan kewajibannya.</p> <p>E. Tindakan Rani membuktikan bahwa hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak saling berkaitan, sehingga satu dapat dijalankan tanpa bergantung pada yang lain.</p> <p>Jawaban: C</p>
13.	<i>Evaluation</i>	Menilai kredibilitas klaim	<p>Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana banjir. Bencana ini terjadi karena beberapa faktor, beberapa di antaranya adalah karena perilaku warga yang membuang sampah sembarangan dan membangun permukiman di bantaran sungai. Ironisnya, pada saat yang sama, mereka menuntut pemerintah untuk segera menangani banjir, memperbaiki infrastruktur, dan memberikan bantuan, seolah mereka tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan sehingga terjadi bencana tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, apa dampak yang paling mungkin dan berbahaya bagi sistem pemerintahan dan kehidupan sosial di Indonesia?</p> <p>A. Pemerintah akan terus meningkatkan bantuan karena bencana merupakan</p>

			<p>tanggung jawab negara.</p> <p>B. Terjadi peningkatan ketergantungan warga terhadap negara yang mengakibatkan menurunnya kesadaran akan kewajiban yang harus dilakukan.</p> <p>C. Masyarakat akan sadar sendiri setelah mengalami kerugian berulang akibat bencana.</p> <p>D. Negara akan menerapkan sistem denda yang lebih ketat untuk mengatasi ketidakpatuhan masyarakat.</p> <p>E. Pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab lingkungan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta.</p> <p>Jawaban: B</p>
14.			<p>Dalam suatu kondisi, tidak jarang warga menolak membayar iuran kebersihan dan tidak mau terlibat dalam kerja bakti lingkungan. Mereka beralasan bahwa kebersihan adalah tanggung jawab Dinas Kebersihan Kota, bukan warga negara. Akibatnya, banyak saluran udara tersumbat, terjadi banjir saat hujan, dan meningkatnya penyakit menular akibat tumpukan sampah. Di sisi lain, mereka menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan masalah tersebut tanpa menuntut keterlibatan warga. Berdasarkan studi kasus ini, dampak paling mendasar dari tidak dilaksanakannya kewajiban warga negara adalah...</p> <p>A. Pemerintah akan segera mengganti petugas kebersihan</p>

			<p>dengan jumlah yang lebih banyak.</p> <p>B. Ketidakpedulian warga akan memperkuat solidaritas sosial antarwilayah yang terdampak.</p> <p>C. Tuntutan masyarakat akan mempercepat pembangunan sarana kebersihan yang modern.</p> <p>D. Rusaknya fungsi sosial warga negara dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.</p> <p>E. Masalah akan selesai dengan sendirinya karena pemerintah pada akhirnya harus turun tangan.</p> <p>Jawaban: D</p>
<p>15.</p>		<p>Menilai kualitas argumen yang dibuat menggunakan penalaran induktif dan deduktif</p>	<p>Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang demi terciptanya perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Namun, dalam suatu kondisi, tidak jarang ditemukan bahwa sebagian lebih menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya, seperti membayar pajak, menjaga kebersihan lingkungan, ataupun menghormati perbedaan. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kerukunan sosial, tetapi juga dapat memperlemah kepercayaan terhadap institusi negara dan memicu konflik di tengah masyarakat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, antara pernyataan berikut yang paling tepat dan mendalam menggambarkan konsekuensi utama dari masyarakat yang mengabaikan kewajibannya?</p>

			<p>A. Negara akan meningkatkan pajak dan denda bagi masyarakat yang tidak taat demi meningkatkan pendapatan negara.</p> <p>B. Pemerintah harus bertindak tegas untuk menghapus beberapa hak warga negara agar setara dengan pelaksanaan kewajiban.</p> <p>C. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan terganggu, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan menurunkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>D. Rakyat akan menuntut reformasi total terhadap sistem pemerintahan yang dianggap gagal menjalankan fungsinya.</p> <p>E. Negara tetap bisa berjalan normal karena tugas utama menjaga stabilitas sepenuhnya berada di tangan pemerintah, bukan masyarakat.</p> <p>Jawaban: C</p>
16.			<p>Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pilar utama terciptanya kesejahteraan sosial dan keberlangsungan negara. Apabila terdapat suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakat Indonesia mulai menuntut haknya seperti memperoleh pelayanan publik yang layak, pendidikan yang berkualitas, serta perlindungan hukum yang adil, namun pada saat yang sama, mereka mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara, seperti</p>

			<p>membayar pajak, mematuhi hukum, menjaga ketertiban, dan menghormati sesama. Jika kondisi ini terus terjadi secara masif dan berkelanjutan, dampak komprehensif apa yang mungkin terjadi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara?</p> <p>A. Pemerintah akan meningkatkan pelayanan publik secara otomatis karena adanya tuntutan masyarakat yang tinggi, meskipun kewajiban warga negara diabaikan.</p> <p>B. Hak-hak warga negara tetap harus dipenuhi pemerintah karena itu adalah tanggung jawab negara, terlepas dari apakah warga negara melaksanakan kewajibannya atau tidak.</p> <p>C. Masyarakat akan mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah, namun hal ini tidak akan mempengaruhi stabilitas negara secara keseluruhan.</p> <p>D. Terjadi ketimpangan yang menyebabkan melemahnya fungsi negara, meningkatnya konflik sosial, dan hilangnya kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi bersama terhadap kehidupan berbangsa.</p> <p>E. Negara akan menetapkan undang-undang yang lebih ketat untuk memaksa warga negara memenuhi kewajiban, sehingga seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui</p>
--	--	--	---

			pendekatan hukum semata.
			Jawaban: D
17.	<i>Inference</i>	Mempertanyakan bukti	<p>Seorang siswa berpendapat bahwa selama pemerintah tidak sepenuhnya adil dalam memberikan pelayanan publik, maka tidak ada kewajiban moral baginya atau masyarakat untuk menaati aturan-aturan yang diberlakukan negara. Dalam diskusi kelas, kondisi ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara. Jika pandangan seperti ini dimiliki secara luas oleh masyarakat, terutama generasi muda, maka apa dampak ideologi dan sosial jangka panjang yang paling mungkin terjadi terhadap eksistensi negara Indonesia?</p> <p>A. Terjadi peningkatan literasi politik karena masyarakat semakin kritis terhadap pemerintah.</p> <p>B. Kesadaran kolektif akan tanggung jawab bersama akan meningkat sebagai respons terhadap krisis kepercayaan.</p> <p>C. Rasa nasionalisme akan semakin menguat karena adanya keseimbangan sikap terhadap negara.</p> <p>D. Pemerintah secara otomatis akan meningkatkan anggaran pendidikan untuk mengubah pola pikir warga negara.</p> <p>E. Masyarakat akan kehilangan rasa peduli terhadap negara, dan semangat persatuan dalam Pancasila akan tergerus secara perlahan.</p>
18.		Dugaan alternatif	Jawaban: E Dalam teori kontrak sosial, negara dibentuk atas

			<p>kesepakatan dasar antara rakyat dan pemerintah untuk saling memenuhi hak dan kewajiban. Namun, jika dalam praktiknya warga negara hanya fokus menuntut hak-haknya, seperti bantuan sosial, subsidi, dan keamanan, tetapi enggan terlibat dalam kerja bakti, taat pajak, serta sering melanggar hukum, maka hubungan antara warga dan negara menjadi timpang. Berdasarkan hal tersebut, konsekuensi apa yang dapat terjadi jika perilaku tersebut terus dilakukan?</p> <p>A. Hubungan antara negara dan rakyat akan berubah dari simbiosis mutualisme menjadi hubungan transaksional yang kurang efektif.</p> <p>B. Negara tetap wajib melayani warganya karena itu adalah tugas konstitusional, tanpa mempermasalahkan sikap warga.</p> <p>C. Kekacauan ini akan memicu negara menjadi represif terhadap hak-hak warga negara demi menyeimbangkan sistem.</p> <p>D. Tindakan warga tersebut mencerminkan bentuk kedaulatan rakyat yang aktif dan tidak perlu berinvestasi.</p> <p>E. Negara akan berubah menjadi negara otoriter karena warga tidak menjalankan kewajibannya secara penuh.</p> <p>Jawaban: A</p>
19.			<p>Pada pemilihan umum legislatif di sebuah wilayah, peran masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya sangat rendah. Banyak warga</p>

			<p>yang merasa tidak perlu ikut memilih karena mereka menganggap semua calon anggota legislatif sama saja dan tidak akan membawa perubahan. Namun, setelah hasil pemilu diumumkan dan wakil yang terpilih tidak memperjuangkan aspirasi rakyat secara maksimal, masyarakat melakukan protes dan mengancam keras kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan. Jika fenomena seperti ini terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, dampak yang paling mungkin terjadi adalah...</p> <p>A. Pemilu di masa depan akan berlangsung lebih damai karena minimnya partisipasi masyarakat akan membawa keuntungan bagi para calon.</p> <p>B. Kualitas demokrasi akan meningkat karena rakyat lebih kritis terhadap wakil rakyat.</p> <p>C. Warga akan lebih memilih dalam memilih calon di masa depan karena sudah belajar dari pengalaman.</p> <p>D. Pemerintah pusat akan mengambil alih dengan menggantikan fungsi pemerintah daerah agar lebih efektif.</p> <p>E. Legitimasi wakil rakyat akan lemah, dan keputusan politik akan kehilangan dukungan moral dari masyarakat.</p> <p>Jawaban: E</p>
20.		Menarik kesimpulan menggunakan penalaran induktif dan deduktif	Fito merupakan salah satu warga negara yang sering mengeluh di media sosial tentang pelayanan publik yang

			<p>menurutnya lambat dan tidak memadai. Ia menuntut pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan gratis dan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat. Namun dalam kesehariannya, Fito dikenal tidak pernah membayar pajak, enggan ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggalnya, dan tidak pernah hadir dalam pemilu dengan alasan tidak percaya pada sistem. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap Fito menunjukkan adanya ketimpangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban. Jika kamu menjadi bagian dari tim penyusun kebijakan pendidikan karakter bangsa, pendekatan yang paling tepat dan logis untuk menjelaskan mengapa tuntutan Fito tidak dapat dibenarkan secara moral maupun konstitusional adalah...</p> <p>A. Karena memberikan hak dan pelaksanaan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban adalah bentuk ketidakadilan.</p> <p>B. Karena hak sebagai warga negara hanya diberikan kepada mereka yang mendukung pemerintah secara terbuka dan aktif dalam media sosial.</p> <p>C. Karena dalam sistem demokrasi Pancasila, hak warga negara tetap dijamin tanpa mempertimbangkan apakah seseorang menjalankan</p>
--	--	--	---

			<p>kewajibannya atau tidak.</p> <p>D. Karena sesuai prinsip keadilan sosial, setiap warga negara berhak menuntut negara tanpa harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya.</p> <p>E. Karena hak warga negara bergantung sepenuhnya pada keputusan penguasa, bukan pada kontribusi warga negara itu sendiri terhadap negara.</p>
<p>21.</p>			<p>Jawaban: A</p> <p>Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara adil sekaligus menjalankan kewajibannya tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, sering kali muncul ketimpangan akses terhadap layanan publik, perbedaan perlakuan hukum, hingga ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Berdasarkan fenomena tersebut, berikut pernyataan di bawah ini yang paling tepat mencerminkan penilaian kritis terhadap sejauh mana pemerintah telah memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat dilaksanakan secara adil?</p> <p>A. Meski regulasi tersedia, pelaksanaan hak dan kewajiban yang adil belum sepenuhnya terwujud karena lemahnya pengawasan dan ketidakmerataan implementasi kebijakan.</p> <p>B. Pemerintah telah menjamin sepenuhnya pelaksanaan hak dan</p>

			<p>kewajiban masyarakat karena telah menyediakan peraturan yang jelas dalam konstitusi dan undang-undang.</p> <p>C. Ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat semata-mata disebabkan oleh kurangnya kesadaran warga dalam menjalankan kewajibannya, bukan karena kelalaian pemerintah.</p> <p>D. Pemerintah tidak memiliki tanggung jawab atas ketidakadilan yang dirasakan masyarakat karena hak dan kewajiban adalah urusan individu masing-masing.</p> <p>E. Keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban hanya dapat tercapai apabila masyarakat sepenuhnya bergantung pada program bantuan pemerintah tanpa kritik.</p> <p>Jawaban: A</p>
<p>22.</p>	<p><i>Explanation</i></p>	<p>Menyatakan hasil</p>	<p>Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum di berbagai wilayah, khususnya di daerah terpencil. Jika pemerintah mengklaim bahwa seluruh hak warga negara telah terpenuhi secara merata, namun data menunjukkan bahwa sebagian</p>

			<p>masyarakat di wilayah tertinggal belum mendapat akses yang setara terhadap pelayanan dasar, maka apa pemberdayaan yang paling tepat dari kondisi tersebut terhadap prinsip keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara?</p> <p>A. Klaim bantuan pemerintah sepenuhnya benar karena telah menyediakan program, walaupun belum seluruhnya dapat menjangkau masyarakat.</p> <p>B. Keterbukaan akses tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum menjalankan kewajibannya secara maksimal.</p> <p>C. Adanya ketimpangan ini menandakan bahwa peran pemerintah daerah lebih dominan daripada pemerintah pusat dalam menjamin keadilan.</p> <p>D. Fakta tersebut tidak relevan dengan persoalan keadilan, karena setiap warga negara memiliki kondisi geografis dan ekonomi yang berbeda.</p> <p>E. Kesenjangan yang terjadi membuktikan bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan distribusi sumber daya dan pelayanannya.</p> <p>Jawaban: E</p>
23.		Justifikasi	Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki

			<p>masyarakat dilaksanakan secara adil dan merata. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi kesenjangan antara kebijakan yang ada dan realisasi di lapangan. Berdasarkan hal ini, berikut dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang ada?</p> <p>A. Pemerintah seringkali gagal dalam memastikan penerapan kebijakan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendukung program-program tersebut, meskipun ada keinginan politik yang kuat.</p> <p>B. Keterbatasan akses informasi dan partisipasi politik dari masyarakat yang terpinggirkan menjadi salah satu faktor yang menghambat terlaksananya keadilan sosial, meskipun kebijakan yang ada sebenarnya sudah cukup adil.</p> <p>C. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dapat sepenuhnya diukur dari seberapa besar peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, tanpa memperhitungkan kesenjangan sosial dan politik yang ada di antara berbagai</p>
--	--	--	---

			<p>kelompok masyarakat.</p> <p>D. Pemerintah sering kali menerapkan kebijakan yang pro-rakyat dengan efektif, namun dibatasi oleh pihak swasta dan korporasi yang lebih berkuasa, yang mendorong kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin meluas.</p> <p>E. Meskipun terdapat ketimpangan pemerintah telah berupaya keras untuk menjamin penyediaan hak melalui program-program sosial dan ekonomi. Namun, keadilan dalam pelaksanaannya tergantung pada kemampuan individu untuk mengakses informasi dan fasilitas yang disediakan pemerintah.</p> <p>Jawaban: B</p>
24.			<p>Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat dilaksanakan secara adil. Namun pada kenyataannya, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan ekonomi, akses terhadap pendidikan, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apakah Anda setuju bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat secara adil di seluruh lapisan masyarakat? Pertimbangkan apakah ada faktor eksternal</p>

			<p>yang mungkin mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.</p> <p>A. Ya, pemerintah telah berhasil memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat secara adil karena kebijakan yang ada sudah merata, dan pemerintah berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan berbagai program bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu.</p> <p>B. Tidak, pemerintah belum sepenuhnya berhasil menjamin keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat karena ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, serta rendahnya pemerataan akses pendidikan yang mempengaruhi peluang masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya secara setara.</p> <p>C. Ya, pemerintah telah berupaya memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat secara adil, namun pelaksanaan kebijakan seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi global, yang membuat keberhasilan kebijakan tidak dapat tercapai secara optimal.</p> <p>D. Tidak, meskipun pemerintah telah</p>
--	--	--	---

			<p>berusaha, faktor ketidakadilan sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan lokal di beberapa daerah masih membuat kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara merata dan adil di seluruh Indonesia, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.</p> <p>E. Tidak, pemerintah tidak berhasil menciptakan sistem yang adil karena kebijakan yang diterapkan terlalu fokus pada infrastruktur pembangunan dan tidak pada mencakup hak dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam mencapai keadilan sosial.</p> <p>Jawaban: B</p>
<p>25.</p>		<p>Memberikan argument</p>	<p>Dalam konteks negara hukum yang berdasarkan Pancasila, salah satu prinsip dasar yang dijunjung tinggi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan suatu negara dalam menjamin hak dan kewajiban warga negaranya tidak hanya terletak pada penerapan hukum yang adil, tetapi juga pada mekanisme pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Namun, tantangan besar muncul ketika ada pihak-pihak yang merasa hak mereka tidak terpenuhi atau kewajiban mereka dianggap terlalu santai. Oleh karena itu, penting untuk</p>

			<p>memikirkan secara mendalam bagaimana cara memastikan hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara adil di Indonesia?</p> <p>A. Menerapkan penegakan hukum yang ketat tanpa memperhatikan status sosial atau ekonomi seseorang, dengan mengabaikan kondisi masyarakat yang lebih terpinggirkan, untuk memastikan keadilan ditegakkan secara objektif.</p> <p>B. Mengandalkan lembaga negara untuk menilai dan memutuskan secara sepihak tentang hak dan kewajiban warga negara, karena negara dianggap lebih berkompeten daripada masyarakat dalam hal tersebut.</p> <p>C. Mengurangi beban kewajiban warga negara dengan memberikan prioritas pada pengurangan pajak bagi individu yang tinggi, guna mempercepat tercapainya pemerataan sosial.</p> <p>D. Memberikan fokus pada pengembangan tatanan dalam pemerintahan.</p> <p>E. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik melalui mekanisme</p>
--	--	--	--

			<p>yang transparan, sekaligus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok marginal agar hak mereka dapat dipenuhi tanpa diskriminasi.</p> <p>Jawaban: E</p>
26.			<p>Dalam negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, keadilan sosial menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai. Keadilan ini mencakup tidak hanya pemerataan hak, tetapi juga pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Namun pada kenyataannya, tidak semua warga negara dapat menjalankan kewajiban atau menerima hak mereka secara setara. Ketidakadilan seringkali muncul akibat perbedaan akses terhadap sumber daya, pengaruh sosial, atau kekuasaan. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar adalah bagaimana kita memastikan bahwa hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara adil di seluruh lapisan masyarakat? Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah ini, berikut pernyataan yang paling tepat untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban secara adil?</p> <p>A. Menegakkan hukum secara tegas tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, namun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masing-masing individu untuk memberikan keputusan yang adil, meskipun hal ini mungkin memerlukan intervensi atau</p>

			<p>penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan sosial.</p> <p>B. Menyerahkan sepenuhnya penentuan hak dan kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan bertindak sebagai otoritas tunggal dalam menjamin keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial tanpa melibatkan unsur masyarakat atau pihak lainnya.</p> <p>C. Mengoptimalkan program-program kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan marginal, sambil mengurangi beban pajak bagi golongan perokok tinggi agar tercipta keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban.</p> <p>D. Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dengan cara mengedukasi seluruh lapisan masyarakat tentang hak-hak mereka melalui berbagai saluran pendidikan, tanpa perlu perubahan struktural dalam kebijakan atau sistem hukum yang ada, sehingga setiap orang dapat menuntut haknya secara mandiri.</p> <p>E. Menciptakan sistem keadilan yang lebih fleksibel dengan memungkinkan negosiasi antara pihak-pihak yang</p>
--	--	--	--

			<p>terlibat, sehingga kesepakatan dapat tercapai tanpa perlu penegakan hukum yang kaku, yang mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi atau keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak.</p> <p>Jawaban: A</p>
27.	<i>Self Regulation</i>	Memeriksa diri sendiri	<p>Dalam sebuah diskusi kelompok, guru meminta peserta didik untuk menilai sejauh mana mereka sudah menjalankan kewajiban sebagai warga sekolah, seperti menjaga kebersihan, disiplin, dan menghormati guru. Tika sebagai salah satu siswa menyadari bahwa selama ini ia hanya fokus pada hak yang ingin diperoleh seperti nilai dan fasilitas belajar. Namun, ia masih sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang peserta didik seperti jarang melaksanakan piket kelas ataupun tidak mengikuti kegiatan upacara. Tika menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan kewajiban sebagai warga sekolah.</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut, sikap Tika mencerminkan...</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ketidakpuasan terhadap aturan sekolah B. Kecenderungan menyalahkan sistem pendidikan C. Ketakutan akan hukuman dari pihak sekolah D. Kesadaran kritis terhadap peran dan tanggung jawab diri E. Penolakan terhadap pembelajaran moral dan kewarganegaraan <p>Jawaban: D</p>
28.			<p>Dina adalah seorang siswi kelas X yang aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolah,</p>

			<p>seperti OSIS dan ekstrakurikuler pramuka. Ia juga selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan membantu teman-temannya belajar. Suatu hari, saat rapat OSIS, Dina mengusulkan program kerja bakti bulanan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Namun, sebagian teman menolak karena merasa itu bukan tugas siswa, melainkan tugas petugas kebersihan. Dina pun mengambil kembali, “Kalau kita sebagai siswa tidak ikut menjaga kebersihan sekolah, apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita dengan benar?” Dari ilustrasi tersebut, sikap Dina menunjukkan kemampuan dalam mengukur diri sendiri, yaitu dengan penilaian apakah dirinya dan teman-temannya sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Kemampuan ini penting dalam kehidupan sebagai warga sekolah, masyarakat, dan negara karena...</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Membantu memperkuat perilaku orang lain agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku secara sepihak. B. Mendorong seseorang untuk merefleksikan tindakan pribadi dan kelompok berdasarkan nilai-nilai tanggung jawab dan hak bersama. C. Menunjukkan bahwa seseorang dapat memaksakan pendapatnya demi menjaga kepentingan umum. D. Menjadi dasar bagi seseorang untuk tidak perlu mengecualikan kembali tindakan
--	--	--	---

			<p>yang dianggap benar secara pribadi.</p> <p>E. Membuktikan bahwa kewajiban hanya berlaku jika ada peraturan tertulis yang mengaturnya secara tegas.</p>
29.	Mengoreksi diri sendiri		<p>Jawaban: B</p> <p>Rudi sering membagikan pendapatnya tentang isu-isu nasional di media sosial, terutama terkait kebijakan pemerintah. Ia merasa punya hak untuk menyampaikan pendapat sebagai warga negara. Namun, ketika ada ajakan dari karang taruna untuk ikut kegiatan diskusi warga membahas masalah lingkungan dan sosial di sekitar tempat tinggalnya, Rudi menolak. Ia beranggapan bahwa partisipasi seperti itu tidak mewakili pendapat di ruang digital. Beberapa waktu kemudian, setelah membaca artikel tentang pentingnya keterlibatan langsung warga dalam kehidupan bermasyarakat, Rudi mulai berpikir: "Apakah saya sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara dengan benar, atau hanya menuntut hak tanpa memberikan kontribusi nyata?" Sikap reflektif Rudi menggambarkan...</p> <p>A. Kemampuan untuk menilai ulang tindakannya sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>B. Kesadaran bahwa hak untuk mengemukakan pendapat cukup diwujudkan melalui media sosial tanpa perlu partisipasi nyata.</p>

		<p>C. Pandangan bahwa warga negara dapat memilih kewajiban mana yang ingin dijalankan sesuai keinginan pribadi.</p> <p>D. Upaya untuk menolak ajakan masyarakat karena lebih mengutamakan ruang publik digital.</p> <p>E. Kesadaran bahwa kewajiban warga negara hanya berlaku ketika sudah mengutarakan pendapatnya.</p>
30.		<p>Jawaban: A</p> <p>Andi adalah siswa yang selalu datang tepat waktu dan mengikuti semua pelajaran dengan tertib. Namun, ia sering merasa kecewa karena menurutnya sekolah belum sepenuhnya menyediakan fasilitas yang nyaman, seperti AC yang rusak dan perpustakaan yang kurang lengkap. Dalam diskusi kelas, Andi menyampaikan, “Saya sadar bahwa sekolah mempunyai keterbatasan, namun mungkin saya juga perlu berpartisipasi lebih aktif menyampaikan masukan secara baik dan ikut menjaga fasilitas yang ada.” Pernyataan Andi menunjukkan bahwa sebagai warga sekolah, ia mulai...</p> <p>A. Menyadari pentingnya tuntutan hak secara keras agar segera dipenuhi pihak sekolah.</p> <p>B. Mengutamakan kritik terhadap sekolah dibandingkan melaksanakan kewajiban sebagai siswa.</p> <p>C. Menghindari penggunaan fasilitas</p>

			<p>agar tidak kecewa terhadap sekolah.</p> <p>D. Menyerahkan seluruh tanggung jawab perbaikan fasilitas kepada guru dan kepala sekolah.</p> <p>E. Mencoba mengoreksi sikapnya sendiri dan mengambil peran aktif dalam perbaikan lingkungan sekolah.</p> <p>Jawaban: E</p>
--	--	--	--



Intelligentia - Dignitas

Lampiran 3. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Kelas Kontrol

KELAS KONTROL			
Kode Siswa	Nilai <i>Pre-Test</i>	Nilai <i>Post-Test</i>	<i>Gainscore</i>
1	40	100	60
2	87	87	0
3	83	90	7
4	80	93	13
5	70	77	7
6	80	93	13
7	70	80	10
8	73	83	10
9	67	77	10
10	50	67	17
11	77	83	6
12	53	67	14
13	67	80	13
14	77	77	0
15	67	77	10
16	73	73	0
17	73	77	4
18	63	73	10
19	80	87	7
20	63	70	7
21	60	67	7
22	73	80	7
23	77	80	3
24	70	83	13
25	67	80	13
26	50	60	10
27	63	77	14
28	70	73	3
29	73	83	10
30	80	93	13
31	77	80	3
32	70	83	13
33	57	60	3
34	63	83	20
35	60	67	7
36	77	80	3

Lampiran 4. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Kelas Eksperimen

KELAS EKSPERIMEN			
Kode Siswa	Nilai <i>Pre-Test</i>	Nilai <i>Post-Test</i>	<i>Gainscore</i>
1	90	93	3
2	83	97	14
3	63	90	27
4	83	90	7
5	87	90	3
6	87	87	0
7	70	73	3
8	63	77	14
9	67	83	16
10	77	90	13
11	63	83	20
12	67	77	10
13	83	93	10
14	70	87	17
15	77	100	23
16	63	83	20
17	50	70	20
18	73	87	14
19	43	70	27
20	40	70	30
21	80	87	7
22	83	90	7
23	50	70	20
24	70	90	20
25	67	80	13
26	60	83	23
27	67	80	13
28	43	63	20
29	50	63	13
30	67	80	13
31	73	77	3
32	67	83	16
33	63	83	20
34	80	93	13
35	70	97	27
36	57	90	33

Lampiran 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif Kemampuan Berpikir Kritis

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pre-Test Kontrol	36	47	40	87	68.89	10.273	105.530
Post-Test Kontrol	36	40	60	100	78.89	9.089	82.616
Pre-Test Eksperimen	36	50	40	90	67.94	13.032	169.825
Post-Test Eksperimen	36	37	63	100	83.31	9.405	88.447
Valid N (listwise)	36						

Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality							
Kelas		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Hasil Berpikir Kritis	Pre-Test Kontrol	.126	36	.157	.953	36	.129
	Post-Test Kontrol	.140	36	.072	.969	36	.399
	Pre-Test Eksperimen	.130	36	.130	.956	36	.167
	Post-Test Eksperimen	.126	36	.161	.955	36	.149

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 7. Hasil Uji Homogenitas *Pre-Test*

Test of Homogeneity of Variance						
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.	
Uji Homogenitas <i>Pre-Test</i>	Based on Mean	1.480	1	70	.228	
	Based on Median	1.581	1	70	.213	
	Based on Median and with adjusted df	1.581	1	67.117	.213	
	Based on trimmed mean	1.598	1	70	.210	

Lampiran 8. Hasil Uji Homogenitas *Post-Test*

Test of Homogeneity of Variance						
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.	
Uji Homogenitas <i>Post-Test</i>	Based on Mean	.229	1	70	.634	
	Based on Median	.296	1	70	.588	
	Based on Median and with adjusted df	.296	1	69.415	.588	
	Based on trimmed mean	.244	1	70	.623	

Lampiran 9. Hasil Uji Hipotesis *Independent Sample t-Test* pada *Pre-Test*

Independent Samples Test											
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		Significance		95% Confidence Interval of the Difference			
		F	Sig.	t	df	One-Sided p	Two-Sided p	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Independent Sample T-Test Pre-Test	Equal variances assumed	1.480	.228	.341	70	.367	.734	.944	2.766	-4.571	6.460
	Equal variances not assumed			.341	66.381	.367	.734	.944	2.766	-4.577	6.466

Lampiran 10. Hasil Uji Hipotesis *Independent Sample t-Test* pada *Post-Test*

Independent Samples Test		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		95% Confidence Interval of the Difference					
Independent Sample T-Test Post-Test	Equal variances assumed	F	Sig.	t	df	Significance		Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
						One-Sided p	Two-Sided p				
	Equal variances assumed	.229	.634	-2.026	70	.023	.047	-4.417	2.180	-8.764	-.069
	Equal variances not assumed			-2.026	69.919	.023	.047	-4.417	2.180	-8.764	-.069

Lampiran 11. Hasil Uji Hipotesis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.109 ^a	.012	-.017	9.167

a. Predictors: (Constant), POST-TEST EKSPERIMEN

b. Dependent Variable: POST-TEST KONTROL



Intelligentia - Dignitas

Lampiran 12. Surat Izin Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon: Rektor : (021) 4893854, WR.I : 4895130, WR.II : 4893918, WR.III : 4892926, WR.IV. : 4893982
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 3829/UN39.12/KM/2025 24 Februari 2025
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi**

Yth. Kepala SMAN 42 Jakarta
Jl. Rajawali Raya, Halim Perdana Kusumah,
Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 13610

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Muthia Ayu Dzati**
NIM : 1401621073
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum
No. Telp/HP : 081311284676

Untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

“Pengaruh Pemanfaatan AI (Artificial Intelligence) ChatGPT terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik (Studi Kuantitatif Peserta Didik Kelas X SMAN 42 Jakarta pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila)”

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Akademik



Dr. Eng. Agung Premono, S.T., M.T.
NIP.197705012001121002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
2. Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lampiran 13. Surat Pernyataan Melakukan Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 42
 Jl. Rajawali – Halim Perdanakusuma
 Telp. : 8093926, Fax. : 80887233
 Website : <https://sman42-ikt.sch.id> e-mail : sman42jaktim@gmail.com
 JAKARTA

Kode Pos 13610

SURAT KETERANGAN
 Nomor 702/PK.01.03

TENTANG
PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Deden Suhendi, M.Pd
NIP/NRK	: 196711111998031005/133177
Pangkat/Golongan	: Pembina Tk. 1, IV/b
Jabatan	: Kepala SMA Negeri 42 Jakarta
NPSN	: 20103297

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MUTHIA AYU DZATI
NIM	: 1401621073
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Jakarta
Program Studi	: S1-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Hukum

Adalah benar nama tersebut telah melaksanakan Penelitian di SMA Negeri 42 Jakarta dengan judul :

“ Pengaruh Pemanfaatan AI (Artificial Intelligence) Chat GPT terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik (Studi Kuantitatif Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 42 Jakarta pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juni 2025
 Kepala SMA Negeri 42 Jakarta

 Deden Suhendi, M.Pd
 NIP. 196711111998031005

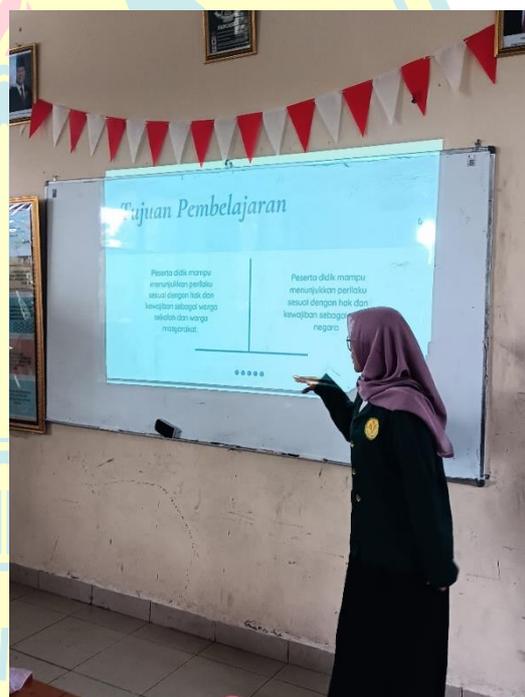
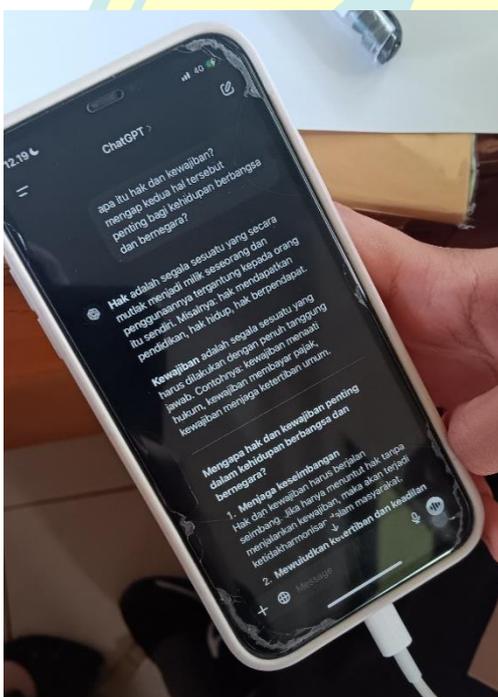


Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian

A. Kelas Kontrol



B. Kelas Eksperimen



Lampiran 15. Hasil Turnitin

Muthia-Ayu-Dzati-1401621073-Skripsi.pdf

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX **18%** INTERNET SOURCES **13%** PUBLICATIONS **7%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	1%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
5	id.scribd.com Internet Source	1%
6	repository.unj.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
8	jurnalkonstan.ac.id Internet Source	<1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
10	docplayer.info Internet Source	<1%
11	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1%

eprints.walisongo.ac.id

RIWAYAT HIDUP



Muthia Ayu Dzati lahir di Jakarta, 25 Maret 2023. Muthia sebagai penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Ningrat dan Ibu Siti Aminatun. Pendidikan dasar ditempuh di SDN Batu Ampar 10 Pagi dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke SMPN 126 Jakarta dan lulus pada tahun 2018, serta SMAN 104 Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan program pengembangan keterampilan. Pengalaman yang pernah diikuti antara lain bergabung ke dalam Organisasi UKM UNJ dan menjadi *staff* eksternal dalam program PKKMB serta PKMP yang dilaksanakan oleh BEM PPKn FISH UNJ. Penulis juga melaksanakan Praktik Keterampilan Mengajar sebagai Guru Pendidikan Pancasila di SMAN 42 Jakarta pada bulan Juli hingga Desember 2024. Skripsi yang disusun dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan AI (*Artificial Intelligence*) ChatGPT terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik (Studi Kuantitatif Peserta Didik Kelas X SMAN 42 Jakarta pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila)” ini ditujukan sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

Intelligentia - Dignitas